

Tim Peneliti**Bisuk Abraham Sisungkunon**

bisuk.a@ui.ac.id

Atiqah Amanda Siregar

atiqah.amanda@ui.ac.id

Faizal Rahmanto Moeis

faizal.rahmanto@ui.ac.id

Syahda Sabrina

syahda.sabrina@ui.ac.id

Muhammad Adriansyah

muhammad.adriansyah@ui.ac.id

Memperbaiki Kualitas Program Bantuan Benih Padi Pemerintah Pusat

Penyediaan beras di Indonesia sangat bergantung pada sentra produksi padi di dalam negeri. Rata-rata selama tahun 2019-2021, 98% dari ketersediaan beras berasal dari produksi dalam negeri (BPS, 2022). Kendatipun demikian, produktivitas beras di Indonesia mengalami pertumbuhan yang relatif rendah selama 20 tahun terakhir dibandingkan negara-negara dengan konsumsi beras per kapita yang mirip. Rata-rata pertumbuhan produksi beras Indonesia pada periode tersebut hanya mencapai 0,3%, lebih rendah dibandingkan negara lainnya, seperti Tiongkok (0,7%), India (2,1%), Filipina (2,3%), Vietnam (1,1%), dan Thailand (1,4%) (FAO, 2022).

Salah satu penyebab rendahnya produktivitas beras di Indonesia berkaitan dengan kualitas benih (Krishnamurti dan Biru, 2019; Norfahmi et al., 2021). Haryanto et al. (2016) menunjukkan bahwa penggunaan benih bersertifikat dapat meningkatkan efisiensi teknis dan potensi produksi beras. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menjalankan program bantuan benih kepada petani padi sejak tahun 2007. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan hasil mutu produk tanaman padi (Kementerian Pertanian, 2020). Bantuan benih padi tersebut merupakan benih varietas unggul bersertifikat sehingga diharapkan penggunaan benih bantuan akan meningkatkan produktivitas padi.

Secara umum, distribusi benih bantuan padi saat ini sudah terstandarisasi dan terverifikasi secara berjenjang sesuai dengan petunjuk teknis Kementerian Pertanian. Mekanisme pengajuan bantuan juga menggunakan platform digital (*e-proposal*) yang dipandu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Selain itu, bantuan bibit pemerintah juga menawarkan varietas benih unggul. Proses distribusi bantuan padi pemerintah diawali dari kelompok tani (poktan) yang melakukan pengajuan bantuan yang dipandu oleh PPL. Nantinya, proposal tersebut akan diverifikasi oleh PPL, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi, hingga ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian. Apabila disetujui, maka Kementerian Pertanian akan menerbitkan Surat Keputusan Bantuan Pemerintah. Setelah itu, Pemerintah Provinsi menjadi pelaksana dari pengadaan bantuan benih yang akan bertugas melakukan *e-purchasing* dengan mengacu pada *e-catalogue*. Apabila pembelian dilakukan di luar provinsi penerima bantuan, uji benih akan dilakukan oleh Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB-TBH) di provinsi penerima bantuan. Nantinya, bantuan benih akan disalurkan melalui kabupaten/kota ke kelompok tani.

Di sisi lain, penerapan program bantuan benih padi ini masih menemui berbagai tantangan selama beberapa tahun terakhir. Salah satu tantangan yang paling umum dijumpai adalah keterlambatan pengiriman bantuan benih. Kendala distribusi ini disinyalir terjadi akibat lokasi produksi benih yang terpusat di Pulau Jawa (Petunjuk

Pelaksanaan Bantuan Benih, 2020), lokasi petani yang sulit dijangkau, serta sebagian dari infrastruktur pedesaan (13% wilayah desa/kelurahan) belum bisa dilalui kendaraan roda 4 (PODES, 2020). Dalam beberapa kasus, petani juga tidak dapat mengusulkan varietas benih yang diinginkan karena Dinas Pertanian sudah memiliki daftar varietas tertentu yang akan disalurkan kepada petani melalui PPL. Bantuan benih yang dikirimkan kepada petani pun beberapa kali tidak sesuai dengan permintaan. Hal ini diketahui karena ketersediaan varietas benih yang diminta oleh petani masih terbatas. Tantangan lainnya yang teridentifikasi dari mekanisme ini adalah masih terdapat sekitar 44% petani padi belum tergabung ke dalam kelompok tani (SOUT 2017), sehingga belum dapat terdaftar sebagai calon penerima bantuan benih padi.

Dengan demikian, upaya perbaikan efisiensi program bantuan benih padi perlu dilakukan mengingat kontribusi produksi padi oleh petani dalam pemenuhan kebutuhan beras domestik. Berikut merupakan beberapa usulan strategi intervensi yang diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan bantuan benih langsung padi.

Pertama, mendorong transformasi varietas benih oleh bagian pengadaan yang akan disalurkan melalui program bantuan benih pemerintah pusat. Pemerintah melalui Balai Besar Penelitian Tanaman Padi telah banyak mengembangkan varietas padi dengan potensi produktivitas tinggi untuk mendukung swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Namun, 38% petani padi pengguna varietas inbrida masih menggunakan benih VUB keluaran lama dengan produktivitas rendah, seperti IR64, Ciherang, dan Mekongga (LPEM FEB UI, 2022). Program bantuan benih padi ini merupakan salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan adopsi varietas benih unggul oleh petani padi.

Kedua, mendorong ekspansi penangkar benih baru di beberapa sentra produksi beras, terutama di luar pulau Jawa. Saat ini, sentra penangkar benih padi terkonsentrasi di pulau Jawa (Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Benih, 2020). Proses distribusi benih padi ke luar Jawa berpotensi menyebabkan penurunan kualitas benih, sehingga benih bantuan yang berasal dari luar provinsi penerima bantuan harus melewati proses uji mutu benih oleh BPSB-TPH. Ekspansi penangkar benih di luar Pulau Jawa dapat mencegah penurunan kualitas benih bantuan, serta menghemat waktu dan biaya distribusi untuk sampai ke petani.

Ketiga, melakukan pemantauan dan evaluasi dari program bantuan benih secara berkala. Proses pemantauan dan evaluasi ini selain untuk mengonfirmasi efektivitas dari program bantuan benih, namun juga untuk menjalin koordinasi dan komunikasi antara petani dengan Dinas Pertanian. Salah satu tantangan yang terjadi adalah varietas benih yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan petani, sehingga akhirnya terkadang petani memilih untuk tidak menggunakan benih bantuan. Selain itu, tantangan ini juga dipengaruhi oleh sifat petani yang cenderung menghindari risiko (*risk averse*), sehingga tidak bersedia menanam benih yang berbeda dari usulan awal.

Terakhir, membangun perluasan akses terhadap informasi mengenai bantuan benih dan budi daya benih unggul. Keterlibatan petani dalam poktan dapat menjadi sarana perputaran berbagai informasi dan pengetahuan, termasuk tentang bantuan benih dan

budidaya benih unggul. Namun sayangnya, sekitar 44% petani padi masih belum tergabung di poktan (SOUT 2017), sehingga tidak memiliki keuntungan akan akses informasi dan juga keterlibatan dalam program bantuan benih. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan untuk mendorong dan mempermudah petani untuk mengakses atau membentuk kelompok tani (poktan). Selain itu, perlu adanya pemantik untuk mendorong kemunculan lebih banyak penangkar benih lokal dan kios penjual benih yang juga berperan sebagai pusat pertukaran informasi di kalangan pemangku kepentingan di sektor pertanian.

Lebih lanjut, akses informasi juga dapat diperoleh melalui sarana digital dan internet. Namun, hanya 13,8% petani yang memiliki akses ke internet (LPEM FEB UI, 2022), sehingga informasi digital belum dapat dimanfaatkan dengan optimal. Padahal, akses pemanfaatan internet dapat memberikan ruang untuk memperluas jaringan relasi, menambah wawasan, membuka peluang pasar baru, serta meningkatkan potensi pendapatan petani (Handika & Sulistiawati, 2021).

Pelaksanaan program bantuan benih telah berkontribusi dalam mendukung petani untuk memenuhi pasokan beras nasional. Namun, hasil evaluasi pelaksanaan program masih menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas dan mekanisme dari pelaksanaan dan pengelolaan program tersebut. Penerapan usulan intervensi ini diharapkan dapat menjadi perbaikan awal untuk mendukung program bantuan benih petani yang lebih baik lagi bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian.